

BAB II

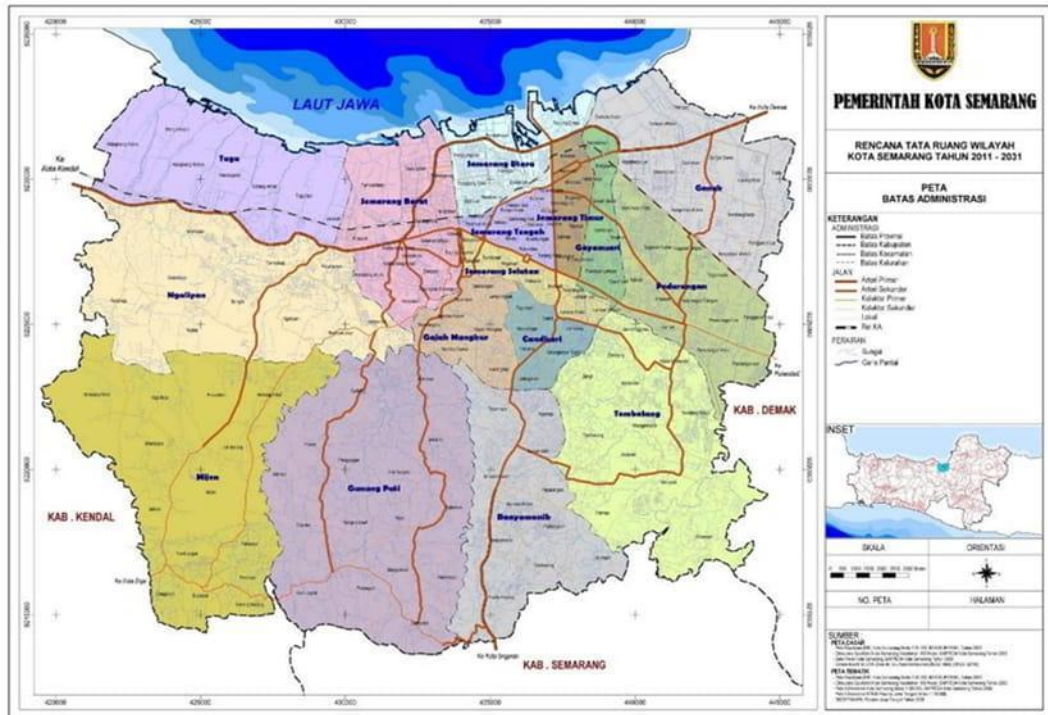
GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang telah berdiri sejak 2 Mei 1547. Secara administratif, Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran penting sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Dengan luas wilayah sekitar 373,70 km², Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang menjadi salah satu kota besar dan memiliki posisi yang strategis di Indonesia. Letaknya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan jasa yang memiliki skala nasional

Kondisi fisik Kota Semarang juga memiliki karakteristik yang cukup unik karena memadukan wilayah pesisir dengan daerah perbukitan. Bentuk lanskap tersebut sering disebut sebagai “Amphitheater Kota”. Di satu sisi, kondisi ini memberikan nilai keindahan serta potensi ekonomi yang cukup besar bagi kota. Namun di sisi lain, karakteristik geografis tersebut juga menimbulkan berbagai potensi ancaman bencana sehingga membutuhkan pengelolaan lingkungan dan tata kelola wilayah yang serius dan berkelanjutan.

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber : PPDI Semarang

Mewujudkan Kota Semarang untuk menjadi semakin hebat yang berlandaskan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan visi Kota Semarang sesuai dengan RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026. Sedangkan Misi yang dimiliki oleh Kota Semarang yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas dan kualitas SDM yang lebih produktif dan berkualitas tinggi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi pancasila, mengembangkan potensi perekonomian lokal yang mampu untuk berdaya saing tinggi dan mendorong pertumbuhan industri melalui riset dan inovasi.

3. Menjamin hak dasar masyarakat, perlindungan kesejahteraan sosial, dan kebebasan masyarakat untuk beribadah secara mandiri.
4. Mengembangkan infrastruktur dengan kualitas tinggi yang ramah lingkungan untuk mendorong pertumbuhan kota.
5. Memperbaiki birokrasi pemerintahan dan membuat undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks NKRI.

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Semarang terletak pada koordinat $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dengan luas wilayah daratan sekitar $373,70 \text{ km}^2$. Kondisi topografi Kota Semarang terbagi menjadi dua wilayah utama yang memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Wilayah pertama adalah dataran rendah yang dikenal sebagai “Semarang Bawah” yang berada di bagian utara kota. Wilayah ini memiliki kemiringan lahan yang sangat landai, yaitu sekitar 0–2%, dengan ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut menjadikan Semarang Bawah sangat rentan terhadap banjir kiriman dari daerah hulu serta fenomena rob akibat pasang air laut, yang semakin diperparah oleh terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence).

Kedua adalah wilayah perbukitan atau "Semarang Atas" yang meliputi bagian selatan kota. Wilayah ini memiliki morfologi bergelombang dengan ketinggian mencapai lebih dari 300 mdpl. Struktur tanah di wilayah ini cenderung memiliki tingkat kelerengan yang curam (di atas 40%), sehingga pada musim

penghujan, wilayah ini memiliki kerawanan yang sangat tinggi terhadap bencana gerakan tanah atau tanah longsor.

2.1.2 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geografis dan demografis Kota Semarang menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan kajian risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Semarang, terdapat beberapa ancaman bencana utama yang sering terjadi, antara lain banjir, banjir rob, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran permukiman, serta kekeringan yang biasanya terjadi pada musim kemarau..

Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi, terutama di wilayah dataran rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingginya curah hujan, keterbatasan sistem drainase perkotaan, serta adanya pasang air laut. Selain itu, fenomena banjir rob dapat terjadi meskipun tidak ada hujan karena dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut serta penurunan permukaan tanah. Dampak yang ditimbulkan dari banjir tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu wilayah perbukitan memiliki ancaman tanah longsor akibat kemiringan lereng dan perubahan penggunaan lahan. Curah hujan dengan intensitas tinggi sering menyebabkan pergerakan tanah yang berpotensi merusak permukiman warga. Ancaman lain seperti angin kencang juga sering menyebabkan kerusakan rumah warga pada masa pancaroba.

2.1.3 Kondisi Demografis

Struktur kependudukan di Kota Semarang mencerminkan karakteristik kota metropolitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil dan kepadatan yang tinggi. Dengan total penduduk mencapai kurang lebih 1,74 juta jiwa, persebaran penduduk terkonsentrasi di wilayah-wilayah pusat bisnis, industri, dan pendidikan. Konsentrasi penduduk yang tinggi pada wilayah rawan bencana, seperti di kawasan pesisir (Semarang Utara dan Genuk) serta kawasan lereng perbukitan (Gunungpati dan Gajahmungkur), meningkatkan indeks risiko bencana dari sisi kerentanan sosial. Kepadatan ini berimplikasi langsung pada sulitnya proses evakuasi dan besarnya potensi kerugian serta korban jiwa jika sebuah bencana terjadi tanpa adanya kesiapsiagaan dari masyarakat setempat.

Tabel 2. 1
Data Demografis Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Mijen	57,55	14	96.357	1.427
2	Gunungpati	54,11	16	102.429	1.866
3	Banyumanik	25,69	11	144.087	5.649
4	Gajahmungkur	9,45	8	56.328	6.607
5	Semarang Selatan	5,93	10	61.981	12.331
6	Candisari	6,54	7	75.396	12.393
7	Tembalang	44,2	12	204.865	4.395
8	Pedurungan	20,72	12	198.452	9.577
9	Genuk	27,39	13	141.033	4.568
10	Gayamsari	6,18	7	70.381	11.675
11	Semarang Timur	5,02	10	66.482	15.183
12	Semarang Utara	10,97	9	117.865	11.163
13	Semarang Tengah	5,23	15	55.213	12.451
14	Semarang Barat	21,74	16	149.357	7.371
15	Tugu	31,78	7	34.398	1.105
16	Ngaliyan	37,18	10	147.797	3.849

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
Total		373,68	177	1.722.421	4.656

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

2.2 BPBD Kota Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 sebagai pengganti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. BPBD Kota Semarang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang.Semarang.

2.2.1 Visi dan Misi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memiliki visi yaitu “Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BPBD Kota Semarang merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasi.
2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

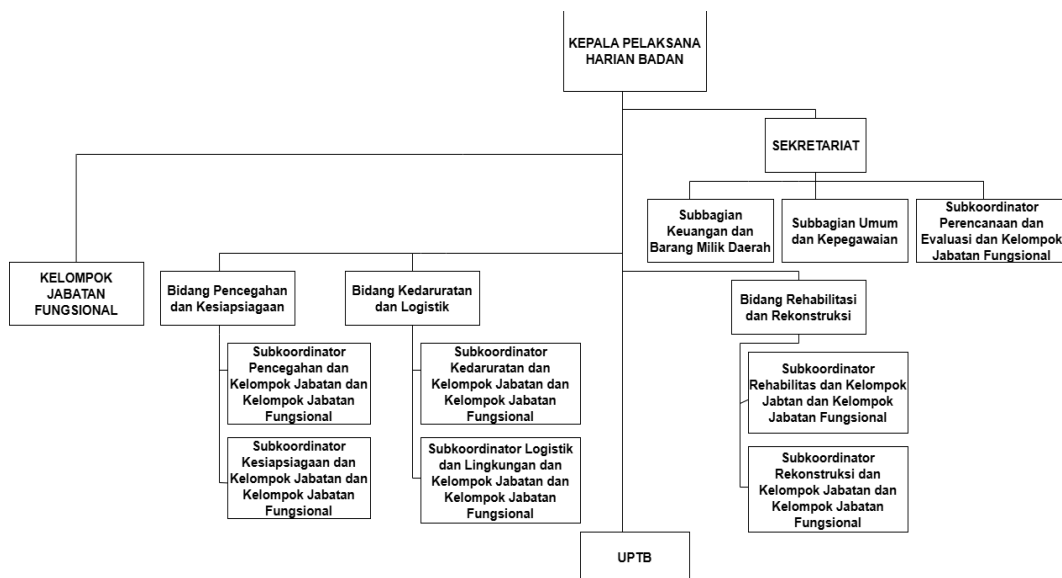
Badan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;

- e. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien: pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB;

2.2.3 Susunan Organisasi

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang



Sumber : BPBD Kota Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana. BPBD dipimpin oleh

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana Harian Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. UPTB; dan
- g. Jabatan Fungsional.

2.3 Kelurahan Gajahmungkur

Kelurahan Gajahmungkur merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Secara administratif, kelurahan ini memiliki posisi yang cukup strategis karena terletak di kawasan perbukitan yang berbatasan langsung dengan pusat aktivitas perkotaan. Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Gajahmungkur memiliki karakteristik wilayah yang beragam, yaitu perpaduan antara kawasan permukiman padat penduduk, keberadaan fasilitas pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan.

Sebagai bagian dari wilayah perkotaan yang berkembang pesat, Kelurahan Gajahmungkur menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk

pengelolaan lingkungan, risiko bencana hidrometeorologi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat.

2.3.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kelurahan Gajahmungkur berada pada wilayah dengan kontur tanah yang relatif berbukit dan memiliki kemiringan lereng tertentu. Kondisi topografi tersebut menyebabkan wilayah ini memiliki potensi risiko bencana seperti tanah longsor, genangan air hujan, serta potensi pohon tumbang pada musim penghujan.

Wilayah kelurahan didominasi oleh kawasan permukiman permanen dengan akses jalan lingkungan yang sebagian berada pada elevasi berbeda. Curah hujan yang cukup tinggi di Kota Semarang turut mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi. Selain itu, sistem drainase lingkungan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko banjir lokal.

Batas wilayah Kelurahan Gajahmungkur secara umum meliputi:

1. Sebelah Utara : kawasan permukiman Kecamatan Candisari
2. Sebelah Selatan : wilayah perbukitan Kota Semarang
3. Sebelah Timur : kawasan permukiman padat penduduk
4. Sebelah Barat : wilayah administrasi kelurahan lain dalam Kecamatan Gajahmungkur..

2.3.2 Kondisi Demografis Kelurahan Gajahmungkur

Penduduk Kelurahan Gajahmungkur terdiri dari berbagai kelompok sosial ekonomi dengan latar belakang pekerjaan yang beragam seperti pegawai swasta, aparatur sipil negara, pelaku usaha kecil, serta sektor informal. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap sistem mitigasi bencana berbasis komunitas menjadi semakin penting.

Sebagian besar masyarakat tinggal pada kawasan permukiman permanen dan semi permanen. Struktur usia masyarakat terdiri dari kelompok usia produktif yang dominan, sehingga potensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan relawan kebencanaan cukup besar. Keberagaman sosial masyarakat juga mendorong terbentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan seperti RT/RW, karang taruna, serta kelompok relawan yang menjadi bagian dari Forum Katana.

2.3.3 Visi Misi Kelurahan Gajahmungkur

Visi Kelurahan Gajahmungkur pada umumnya selaras dengan visi pembangunan Kota Semarang yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, masyarakat yang mandiri, serta lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Adapun misi kelurahan meliputi :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
4. Memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

2.3.4 Susunan Organisasi

Gambar 2. 3
Struktur Organisasi Kelurahan Gajahmungkur



Sumber: Web Kelurahan Gajahmungkur

2.4 Kelurahan Meteseh

Kelurahan Meteseh merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Wilayah ini berkembang sebagai kawasan permukiman sekaligus kawasan pendidikan karena lokasinya tidak jauh dari area kampus serta berada pada jalur penghubung antar kecamatan.

Pertumbuhan permukiman yang cukup pesat menyebabkan perubahan tata guna lahan yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, terutama meningkatnya risiko banjir lokal akibat berkurangnya daerah resapan air.

2.4.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kelurahan Meteseh memiliki karakteristik wilayah berupa dataran bergelombang dengan sebagian area berada pada kontur perbukitan khas wilayah selatan Kota Semarang. Kondisi topografi ini menyebabkan adanya variasi tingkat kerentanan bencana antar lingkungan permukiman.

Wilayah bagian atas kelurahan memiliki kemiringan lereng tertentu yang berpotensi mengalami pergerakan tanah terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Sementara itu, pada wilayah dataran rendah sering terjadi genangan akibat kapasitas saluran drainase yang terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan kawasan permukiman.

Curah hujan yang relatif tinggi di Kota Semarang turut memperbesar potensi risiko hidrometeorologi. Selain itu, perubahan iklim global menyebabkan pola hujan yang tidak menentu sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir lokal.

Batas wilayah Kelurahan Meteseh secara umum meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah permukiman Kecamatan Pedurungan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah perbukitan Kecamatan Tembalang.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rowosari.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kawasan permukiman lain di Kecamatan Tembalang..

2.4.2 Kondisi Demografis Kelurahan Meteseh

Kondisi geografis tersebut menjadikan mitigasi berbasis masyarakat menjadi penting melalui penguatan kapasitas warga dalam mengenali ancaman bencana serta melakukan evakuasi mandiri apabila terjadi kondisi darurat.

Penduduk Kelurahan Meteseh terdiri dari masyarakat heterogen dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Sebagian masyarakat bekerja pada sektor jasa, perdagangan, pendidikan, serta industri kecil. Selain itu, keberadaan mahasiswa dan pendatang turut mempengaruhi dinamika sosial masyarakat.

Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kepadatan permukiman di beberapa lingkungan. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan layanan publik termasuk pengelolaan risiko bencana.

Struktur usia masyarakat didominasi oleh kelompok usia produktif yang memiliki potensi besar sebagai relawan kebencanaan. Keberadaan organisasi sosial masyarakat seperti RT/RW, PKK, serta karang taruna menjadi modal sosial dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana..

2.4.3 Visi Misi Kelurahan Meteseh

Kelurahan meteseh mempunyai misi mewujudkan masyarakat sehat yang memiliki kemampuan cipta, rasa dan karya yang tinggi dengan berkarakter, demokratis, berbudaya, partisipatif, mandiri, kreatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta Sejahtera. Visi tersebut dibuktikan dan didukung dengan misi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berpengetahuan berkemampuan dan berkepribadian serta religius

2. Mewujudkan kelurahan yang sehat
3. Mewujudkan peningkatan pelayanan public
4. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan
5. Mewujudkan peningkatan tarif hidup masyarakat

2.4.4 Susunan Organisasi

Gambar 2. 4
Struktur Organisasi Kelurahan meteseh



2.5 Kelurahan Rowosari

Kelurahan Rowosari merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Wilayah ini memiliki karakteristik semi perkotaan dengan perpaduan antara kawasan permukiman, lahan

terbuka, serta area perbukitan. Seiring waktu, wilayah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat akibat meningkatnya kebutuhan permukiman di kawasan pinggiran kota.

Perubahan tata guna lahan menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi terutama banjir, longsor, dan genangan air. Berdasarkan hal tersebut penguatan kapasitas masyarakat melalui Program Kelurahan Tangguh Bencana menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi risiko bencana di tingkat lokal.

Pelaksanaan Program Katana di Kelurahan Rowosari melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti relawan, organisasi kemasyarakatan, serta aparat kelurahan yang berperan dalam membangun kesiapsiagaan komunitas.

2.5.1 Kondisi Geografis

Selain itu, beberapa daerah dataran rendah memiliki potensi genangan air akibat aliran permukaan yang berasal dari wilayah lebih tinggi. Sistem drainase menjadi faktor penting dalam mengendalikan risiko tersebut.

Curah hujan tinggi serta perubahan pola iklim turut meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi. Berdasarkan faktor tersebut, penyusunan peta risiko bencana serta jalur evakuasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Katana.

Batas wilayah Kelurahan Rowosari meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pedurungan.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kawasan perbukitan Kota Semarang.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Demak.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Meteseh.

2.5.2 Kondisi Demografis Kelurahan Rowosari

Penduduk Kelurahan Rowosari terdiri dari masyarakat dengan latar belakang pekerjaan beragam mulai dari sektor informal, pertanian skala kecil, perdagangan, hingga pekerja formal di kawasan perkotaan.

Sebagian wilayah masih memiliki karakter komunitas yang kuat dengan interaksi sosial yang tinggi antar warga. Modal sosial tersebut menjadi kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan berbasis gotong royong termasuk kegiatan mitigasi bencana. Struktur usia masyarakat didominasi kelompok usia produktif sehingga mendukung pembentukan relawan tanggap bencana yang aktif.

2.5.3 Visi Misi Kelurahan Rowosari

Visi pembangunan Kelurahan Rowosari diarahkan pada terciptanya masyarakat yang mandiri, sejahtera, serta tangguh terhadap risiko bencana.

Adapun misi kelurahan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Mendorong pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

2.5.4 Susunan Organisasi

Gambar 2. 5
Struktur Organisasi Kelurahan Rowosari



2.6 Program Katana

Kelurahan Tangguh Bencana merupakan wilayah kelurahan yang memiliki kemampuan untuk secara mandiri beradaptasi terhadap berbagai potensi ancaman bencana serta mampu melakukan pemulihan secara cepat ketika mengalami dampak bencana. Kelurahan Tangguh Bencana dapat dimaknai sebagai wilayah yang mampu mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungannya sekaligus mengorganisasikan sumber daya masyarakat yang tersedia untuk menekan tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana. Kemampuan tersebut diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang mencakup berbagai upaya, seperti pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko

bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pemulihan setelah terjadinya kondisi darurat.

Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu strategi pengurangan risiko bencana yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam berbagai upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan tingkat kerentanan yang ada, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Dalam implementasinya, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengkajian, analisis, penanganan, pemantauan, hingga evaluasi terhadap risiko bencana yang ada di wilayahnya. Keterlibatan tersebut juga memanfaatkan berbagai sumber daya lokal yang tersedia agar keberlanjutan program dapat terjaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut, di mana pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dukungan berupa sumber daya maupun bantuan teknis yang diperlukan oleh desa atau kelurahan. Selain itu, pengembangan Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana juga perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Proses perencanaan dan penganggaran Program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sementara itu, usulan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbang Kota). Pada tingkat desa, pelaksanaan pengembangan Desa Tangguh Bencana setidaknya harus didasarkan pada Peraturan Kepala Desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun pada tingkat kelurahan, pelaksanaan pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota.

2.6.1 Tujuan

Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

2.6.2 Komponen Katana

Terdapat 20 Indikator Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) merupakan instrumen pengukuran ketangguhan desa yang umumnya mencakup lima komponen utama: kebijakan PRB, perencanaan PB terpadu, forum PRB, kesiapsiagaan, dan pemulihan. Indikator ini dinilai dalam 4 tingkatan (dasar, fungsi, evaluasi, diseminasi).

Berdasarkan pedoman umum, indikator Destana/Katana yang umum dinilai meliputi :

Komponen 1 & 2: Dasar dan Kelembagaan

1. Adanya Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di desa/kelurahan.
2. Legalisasi aturan PRB (Perdes/Peraturan Kelurahan).
3. Dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana (PB).
4. Keterpaduan dokumen PB ke dalam RPJM Desa/Kelurahan.
5. Keterpaduan dokumen PB ke dalam RKP Desa/Kelurahan.
6. Adanya Forum PRB desa/kelurahan.
7. Keaktifan Forum PRB dalam menggerakkan masyarakat.
8. Adanya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Difabel, dan Inklusi Sosial) dalam Forum.

Komponen 3: Pengelolaan Risiko Bencana

9. Adanya dokumen kajian risiko bencana tingkat desa/kelurahan.
10. Adanya peta risiko bencana desa/kelurahan.
11. Adanya peta evakuasi dan rambu-rambu bencana.
12. Adanya upaya pengurangan kerentanan (fisik dan sosial).
13. Adanya peningkatan kapasitas SDM masyarakat.

Komponen 4: Kesiapsiagaan Darurat

14. Prosedur tetap (Protap) evakuasi yang jelas.
15. Adanya jalur dan tempat evakuasi sementara yang aman.
16. Simulasi evakuasi secara rutin.
17. Adanya Tim Siaga Bencana Desa (TSBD).

Komponen 5: Kesiapsiagaan Pemulihan

18. Adanya rencana pemulihan darurat dan pascabencana.
19. Diversifikasi sumber pendanaan (mandiri/swadaya) untuk PRB.

2.6.3 Tingkat Ketangguhan

Indikator-indikator dalam ketiga kriteria tingkat ketangguhan Destana/Katana antara lain:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Adanya kebijakan Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) yang telah dilegalkan dalam bentuk perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan.

- b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
 - c. Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.
 - d. Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
 - e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan.
 - f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya, dengan indikator sebagai berikut:
- a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa/kelurahan.
 - b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa.
 - c. Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif.

- d. Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif.
 - e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji.
 - f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.
3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama, dengan indikator sebagai berikut:
- a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa/kelurahan.
 - b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB.
 - c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.
 - d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Tim Relawan PB Desa/Kelurahan.
 - e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan.
 - f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Destana/Katana antara lain:

1. Pengkajian risiko desa/kelurahan (menilai ancaman, menilai kerentanan, menilai kapasitas, menganalisis risiko bencana).
2. Perencanaan PB dan perencanaan kontinjensi desa/kelurahan (RPB Desa/Kelurahan dan Renkon Desa/Kelurahan).
3. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan.
4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB.
5. Pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa/kelurahan dan legalisasi.
6. Pelaksanaan PRB di desa/kelurahan
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat desa/kelurahan